

EDISI : Rabu, 02 Oktober 2019

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN BULELENG

RESUME BERITA**EDISI :Rabu, 02 Oktober 2019**

NO	NAMA MEDIA	JUDUL BERITA	RESUME	KET.
1	FAJAR BALI	WTP 5 Kali Beruntun, Raih Penghargaan Menkue	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pengelolaan keuangan daerah, telah lima kali diraih secara berturut-turut oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng. Berkat prestasi tersebut, Pemkab Buleleng diganjar penghargaan oleh Kementrian Keuangan (Kemenkeu). Penghargaan tersebut diserahkan oleh kepala kantor wilayah direktorat jendral perbendaharaan provinsi bali, Tri Budhianto kepada Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana,ST di ruang rapat Lobi Kantor Bupati Buleleng, Selasa (1/10) kemarin.	
		Lovina Festival ke-8 Resmi Ditutup	Gelaran Lovina Festival ke-8 tahun 2019 yang dirangkaikan dengan kedatangan kapal-kapal wisata yang menjadi peserta wonderfull sail Indonesia ditutup secara resmi oleh staf Ahli Mentri Kemaritim Bidang pemukulan gong. Acaa penutupan juga dirangkaikan dengan penyerahan hadiah Lovina Festival. Acara penutupan diawali dengan pelepasan ratusan tukik oleh Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana,ST dan Wakil Bupati Buleleng dr. I Nyoman Sutjidra,Sp.OG didampingi kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng di bibir pantai Binaria Lovina dan dimeriahkan oleh pertunjukan Marching band sekolah dasar, tari tradisional.	
		Komisi IV DPRD Buleleng Janji Cari Solusi	Hal tersebut terungkap disaat Kondisi IV DPRD Kabupaten Buleleng melakukan sidak ke RSUD Singaraja, selasa (1/10) siang	

			<p>kemarin. Pelaksanaan sidak komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV Ni Luh Hesti Ranita Sari bersama dengan seluruh anggota mengetahui kalau pasien yang menggunakan jaminan BPJS tidak bertanggung fasilitas ambulance utamanya pasien yang meninggal dunia.</p>	
2	NUSA BALI	BPJS Belum Pastikan Membayar	<p>Jumlah klaim biaya kesehatan yang diajukan pihak RSUD Buleleng, terus bertambah. Namun, pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Singaraja, belum dapat memastikan pembayaran klaim tersebut. Semua RSUD Buleleng mengajukan klaim biaya kesehatan periode Juni-Juni 2019 Rp 17 miliar. Jumlah tersebut belum bisa dilunasi oleh BPJS hingga September 2019. Kini, RSUD kembali mengajukan klaim periode Agustus mencapai Rp 23 miliar.</p>	



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Nusa Bali*

Kategori : *WTP*

Raih Opini WTP Lima Kali Beruntun, Buleleng Dapat Penghargaan Kemenkeu

SINGARAJA, NusaBali

Pemkab Buleleng kembali mendapat opini 'tertinggi' Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018. Ini predikat WTP kelima secara beruntun yang diperoleh Buleleng dari BPK sejak LKPD 2014. Buleleng pun dapat penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Penghargaan untuk Buleleng atas prestasinya meraih opini WTP atas LKPD tahun anggaran 2018 tersebut diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah (Ka-



Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

Bupati Buleleng Agus Suradnyana (kiri) terima penghargaan Kemenkeu, Selasa (1/10).

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

kanwil) Provinsi Bali Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Tri Budhianto, kepada Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Selasa (1/10) pagi. Penyerahan penghargaan dilakukan di Ruang Rapat Lobi Kantor Bupati Buleleng, Jalan Veteran Singaraja.

Tri Budhianto menjelaskan, capaian opini WTP 5 kali secara berturut-turut ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah oleh Pemkab Buleleng terbukti akuntabilitasnya. Masyarakat perlu mengetahui hal tersebut. Begitu pula dengan Kemenkeu atas nama Pemerintah Republik Indonesia, merasa perlu memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemkab Buleleng. "Namun, kerjanya belum selesai. Kita harus meningkatkan kinerja pada pengelolaan keuangan," jelas Tri Budhianto.

Mengenai reward terhadap Buleleng, menurut Tri Budhianto, sebenarnya ada satu mekanisme transfer yaitu Dana Insentif Daerah (DID). Namun, ada beberapa kriteria untuk bisa meraih DID tersebut, salah satunya pencapaian opini WTP. "Setahu saya, tahun ini Pemkab Buleleng telah memperoleh DID tersebut. Jumlahnya bervariasi. Bisa sampai Rp 50 miliar, tergantung capaiannya," terang Tri Budhianto.

Sementara itu, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengungkapkan penghargaan

dari Kemenkeu atas sukses 5 kali beruntun meraih opini WTP ini sangat penting, terutama dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut Agus Suradnyana, banyak manfaat yang bisa didapat dengan torehan penghargaan tersebut.

"Salah satunya adalah sebagai daerah yang sebagian besar masih bergantung dari dana transfer pemerintah pusat, pengelolaan keuangan yang akuntabel bisa ditingkatkan jumlahnya ke depan, baik Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU). Ini untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah kita," tandas Bupati Agus Suradnyana.

Agus Suradnyana menyebutkan, seiring dengan kebijakan yang implementatif dari Pemprov Bali, keseimbangan pembangunan Bali Utara, Bali Selatan, Bali Timur, dan Bali Barat sudah mulai terlaksana. Upaya keseimbangan ini menggunakan kemampuan keuangan daerah dan APBN.

Kegiatan yang mendorong pembangunan yang seimbang ini, kata Agus Suradnyana, membuat Pemkab Buleleng lebih gencar lagi untuk bekerja. "Dengan momentum percepatan aksesibilitas di Buleleng, kita juga harus menyesuaikan," tandas Bupati asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang juga menjabat Ketua DPC PDIP Buleleng ini.

Sekadar dicatat, Buleleng

awalnya sempat dapat opini disclaimer (rapor merah) dari BPK atas audit LKPD tahun anggaran 2010. Setahun berikutnya, Buleleng naik kelas ke opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Opini WDP itu diperoleh tiga kali secara beruntun yakni audit atas LKPD tahun anggaran 2011, 2012, dan 2014. Barulah dalam audit atas LKPD tahun anggaran 2014, Buleleng naik ke kasta tertinggi opini WTP. Selanjutnya, opini WTP dipertahankan terus sampai sekarang.

Sementara, penyerahan penghargaan dari Kemenkeu terakik sukses Pemkab Buleleng meraih opini WTP 5 kali beruntun, Selasa kemarin, juga dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Keuangan Daerah yang diikuti oleh seluruh Kepala OPD lingkup Pemkab Buleleng. FGD ini digelar dalam rangka memantapkan koordinasi pelaksanaan APBN di daerah.

Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa, berharap ke depan opini WTP bisa diraih kembali dengan catatan-catatan yang lebih baik. Dalam kaitan itulah digelar FGD Pengelolaan Keuangan Daerah. "FGD ini dilaksanakan untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi di masa datang, juga sebagai evaluasi dan referensi untuk menghadapi kendala-kendala oleh SKPD yang mengelola dana APBN," terang Gede Suyasa. @ k19



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Nusa Bali*

Kategori : *Pelantikan*

Wabup Sutjidra Minta BPD Dalam UU Desa



• NUSABALI/SUDIERTA

WABUP Buleleng dr Nyoman Sutjidra berfoto bersama usai pelantikan dengan anggota BPD se Kecamatan Seririt, Buleleng.

SINGARAJA, NusaBali

Wakil Bupati Buleleng dr Nyoman Sutjidra meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di setiap desa agar mendalami dan memahami isi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan pendalaman itu, semua BPD dapat meningkatkan profesionalnya dalam pembangunan desa.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Buleleng dr Nyoman Sutjidra di sela-sela pelantikan anggota BPD se Kecamatan Seririt, Selasa (1/10) pagi.

89 anggota BPD dilantik di Gedung Serbaguna, Desa Tangguwisia, Kecamatan Seririt, Buleleng. Wabup Sutjidra mengatakan, dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, BPD mempunyai tugas dan fungsi yang sangat berat. Se-

hingga, anggota BPD dituntut memiliki bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan yang memadai sehingga BPD dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Di samping itu, BPD harus memahami teknokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, mulai dari penyelenggaraan musyawarah desa, penyusunan peraturan desa, pengelolaan keuangan desa, pemilihan perbekel, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pengelolaan aset desa. Wabup Sutjidra pun meminta kepada seluruh BPD yang baru dikukuhkan, senantiasa belajar dan terus mengembangkan diri. Kepada segenap jajaran perangkat daerah Kabupaten Buleleng agar bisa memberikan pembinaan dan pendampingan secara

berkelanjutan kepada BPD yang mengacu pada UU Desa. "Khusus kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Buleleng, saya minta usai peresmian BPD ini segera dilaksanakan pelatihan pra tugas bagi seluruh anggota BPD," katanya.

Kepala Dinas PMD Buleleng Made Subur mengatakan, anggota BPD dapat bersinergi dengan perbekel (kepala desa) guna menggali potensi-potensi yang ada di desa dan menjadi sumber pendapatan desa itu sendiri. "Tujuannya tidak lain yakni memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Desa," katanya.

Lebih lanjut dikatakan, melalui UU Desa, dapat memberikan gambaran tentang bagaimana menjalankan pemerintahan desa, sehingga melalui kerjasama antara BPD dan Kepala Desa yakni dengan melakukan pengelolaan BUMDes yang tepat akan membuka peluang tenaga kerja di desa. Dia pun berpesan kepada seluruh stakeholder masyarakat desa, utamanya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa agar senantiasa dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. "Jangan sampai berkah lahirnya UU Desa ini dikemudian hari menjadi petaka bagi Pemerintah Desa dan masyarakat desa itu sendiri," jelasnya. **k19**



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Nusa Bali*

Kategori : *Budidaya*

Buleleng Mantapkan Budidaya Vanili

Lirik Peluang Pasar Ekspor

SINGARAJA, NusaBali

Dinas Pertanian Buleleng saat ini sedang memantapkan budidaya vanili. Berbagai solusi perbaikan terhadap budidaya yang baik dan benar terus diberikan kepada petani untuk mendapatkan hasil panen yang berkualitas dan berkesinambungan.

Beberapa waktu lalu, pembeli dari luar negeri juga didatangkan untuk menangkap peluang pasar ekspor untuk komoditas ini.

Kepala Dinas Pertanian Buleleng I Made Sumiarta, ditemui di ruangannya Selasa (1/10), mengatakan pihaknya kini telah bekerjasama dengan Universitas Udayana untuk budidaya vanili, melalui Bali Organik Subak (BOS) Petani Muda Keren, UPTD Balai Proteksi Tanaman Provinsi Bali dan juga Persatuan Vanili Singaraja Bali (PVSB), petani vanili di Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Buleleng, untuk memantapkan pengelolaan hasil budidaya.

Dia mengatakan saat ini budidaya vanili di Buleleng sedang dibangkitkan lagi, terutama untuk memaksimalkan hasil panen dan kualitas produk pertaniannya. Produksi vanili di Buleleng sejak tahun 1990 agak meredup. Karena, khususnya vanili di Bali kalah kualitas dengan produksi vanili daerah lain. "Ini yang sedang kami perbaiki, sehingga *image* vanili Bali yang sejak tahun sembilan puluhan dikenal kualitasnya tidak bagus akan ditingkatkan dengan budidaya yang baik dan benar, sehingga mampu menangkap peluang pasar yang sangat menjanjikan," jelas I Made Sumiarta.

Sejauh ini, lanjut dia, di Buleleng secara geografis dan iklim sangat cocok untuk budidaya vanili. Bahkan terdapat luasan tanamnya ada 90 hektare.



● NUSABALULIK

BUDIDAYA vanili di Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, menjadi sentra vanili Buleleng untuk menangkap pasar ekspor.

Hanya saja produksinya masih skala kecil dan masih bermain di lokal. Produksi per tahunnya pun masih di bawah 10 ton. Padahal potensi ini menurutnya dapat dikembangkan jika ada komitmen dari petani vanili berbudidaya yang baik dan benar. Salah satunya peluang pasar ekspor yang terbuka lebar untuk hal itu. Harga vanili juga sangat menggijurkan untuk kesejahteraan petani. Menurut *buyer* asal Swiss, vanili kering per kilogramnya dibeli dengan harga Rp 500.000, sedangkan yang kering kualitas super berkisar Rp 2 juta - Rp 3 juta per kilogram.

"Kemarin ada *buyer* dari Swiss juga yang datang, arahnya memang ke ekspor. Tapi untuk bisa memenuhi itu, kami perlu penuhi standarnya dulu, mulai dari penyiapan SOP (standar operasional prosedur) dulu, perbaikan kualitas produksi dan segi mutu juga serta kontinuitasnya. Ini yang sedang kami petakan dan kejar terus," jelas dia. Sejauh ini, kata Sumiarta, petani vanili masih sering kali belum

dapat menghadapi serangan penyakit puserium atau layu batang. Hal itu kini sudah diantisipasi dan dicarikan solusi dengan menggandeng Udayana dan UPTD Balai Proteksi Tanaman Provinsi Bali.

Guna memudahkan pembinaan dan sosialisasi budidaya yang baik dan benar, tak hanya komoditas vanili, Dinas Pertanian juga membentuk koperasi petani dari pelbagai komoditas. Perkumpulan petani dengan jenis budidaya yang sama akan diarahkan menjadi sentra komoditas sesuai dengan potensi pertanian yang dimiliki. "Misalnya di Ambengan yang sekarang budidaya vanilinya berkembang akan kami bentuk kampung vanili. Begitu juga Gerokgak dengan potensi pisangnya bisa sebagai kampung pisang, atau di Busungbiu yang potensi kopi bagus sebagai kampung kopi. Jadi nanti akan ada sentra-sentra komoditas untuk mengendalikan pasar dan *brand image* hasil pertanian di Buleleng," ucap Kadis I Made Sumiarta. **K23**

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



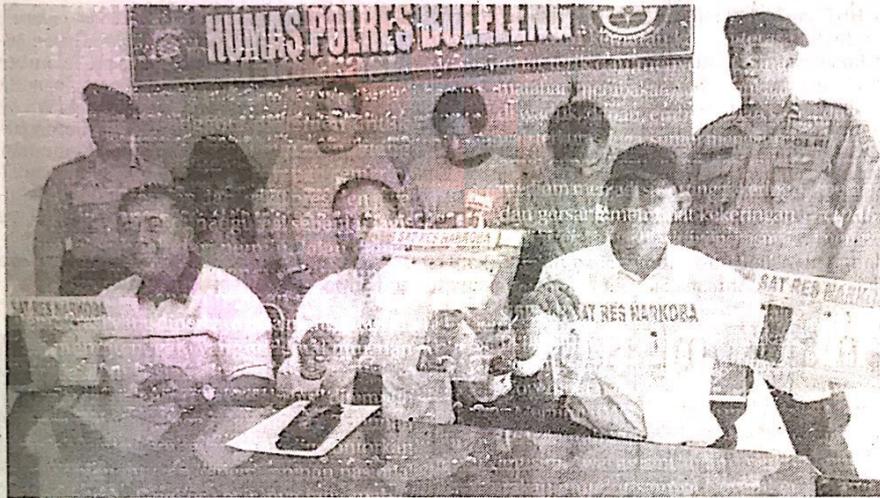
KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : Nusa Bali

Kategori : Sabu - sabu

Polisi Tangkap Empat Pelaku Narkoba

Satu Pelaku Wanita Residivis Narkoba



EMPAT tersangka penyalahgunaan narkoba yang diamankan Satnarkoba Polres Buleleng, Selasa (1/10).

SINGARAJA, NusaBali
Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Buleleng kembali menangkap pelaku penyalahgunaan narkoba jenis Sabhu-sabhu. Salah satu dari empat orang itu di antaranya seorang wanita yang pernah terjerat kasus yang sama empat tahun lalu.

Mereka diamankan di seputaran Kota Singaraja dengan jaringan berbeda. Kasat Narkoba Polres Buleleng AKP I Made Derawi, didampingi Kasubag Humas Polres Buleleng Iptu I Gede Sumarjaya, mengatakan empat pelaku diamankan di lokasi dan waktu yang berbeda. Tiga orang di antara mereka, masuk dalam Target Operasi (TO) Satnarkoba Polres Buleleng dalam operasi antik yang dilaksanakan 13 - 28 September 2019. "Empat tersangka ini kami

amankan di wilayah Kota Singaraja. Termasuk satu orang di luar TO kami. Saat ini masih pengembangan dan belum final," jelas AKP I Made Derawi, seizin Kapolres Buleleng, AKBP Suratno, Selasa (1/10).

Mantan Kapolsek Sawan, Buleleng itu juga menje-laskan tersangka wanita atas nama Luh Mas alias Sugik, 32, warga Jalan Camar, Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan/Kabupaten Buleleng merupakan salah satu dari tiga target yang dibidik Satnarkoba Polres Buleleng.

Bahkan Luh Mas juga sudah pernah dijebloskan ke dalam sel penjara tahun 2015 lalu dengan kasus yang sama. Ibu rumah tangga ini kemudian kembali menghirup udara segar setelah menjalani tujuh bulan masa tahanan. "Yang perempuan

residivis, dulu sudah pernah diamankan kasus yang sama kepemilikan sabhu-sabhu juga," imbuh dia.

Luh Mas diamankan pada Jumat (27/9) pukul 13.00 Wita di Jalan Raya, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Buleleng. Polisi pun menemukan satu paket sabhu-sabhu seberat 0,57 gram saat dilakukan pengeledahan badan.

Selain Luh Mas, sebelumnya Satnarkoba Polres Buleleng juga mengamankan seorang pengedar Wayan Sukrayasa alias Procot, 27, warga asal Banjar Dinas Kelodan, Desa Pengelatan, Kecamatan/Kabupaten Buleleng, Jumat (20/9) pukul 12.30 Wita. Dia diamankan di rumahnya dengan dua paket sabhu-sabhu seberat 0,28 gram dan satu unit alat hisap.

Dua terangka lainnya yakni Wayan Darmayasa alias Kingkong, 34, warga Banjar Dinas Kajanan, Desa Pengelatan, Kecamatan/Kabupaten Buleleng, diamankan Kamis (16/9) dan Made Wijaksana Arta alias Dek Wi, 36, warga Kelurahan Banyuning, Kecamatan/Kabupaten Buleleng, ditangkap Selasa (24/9) ditetapkan hanya sebagai pengguna. "Kami masih kembangkan keempat kasus ini dan akan mengajukan kepada BNN untuk rehabilitasi. Sementara total barang bukti yang kami amankan total kurnag lebihs tau gram," jelas AKP I Made Derawi.

Terkait keempat tersangka, dipasagkan pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Luh Mas yang satu-satunya residivis, Satnarkoba Polres Buleleng memilih enggan berbicara. Dia bungkam saat ditanya sejumlah media kemarin. Sedangkan tersangka Procot yang ditetapkan sebagai pengedar sabhu-sabhu, mengaku baru melakukan bisnis gelap itu sekitar 3 - 4 bulanan. Selain itu dia juga menggunakan sendiri dengan dalih menjaga stamina saat bekerja malam. "Saya kerja jadi sopir truk material. Biasanya pakai saat berangkat malam, ambil material ke Karangasem, biar fit dan tidak ngantuk," akunya. Sedangkan barang terlarnag itu diakuinya dibeli dari warag Pengelatan juga dengan sistem pembelian langsung jemput bola ke penjual dengan harga stau paketnya Rp 300.000. k23

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Nusa Bali*

Kategori : *LSS*

Wakili Bali Dalam Lomba Sekolah Sehat SDN 3 Banjar Jawa Diverifikasi Tim Pusat

SINGARAJA, NusaBali

SDN 3 Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Buleleng, menjadi duta Bali dalam Lomba Sekolah Sehat (LSS) di tingkat nasional. Sekolah ini kembali menerima kunjungan verifikasi tim LSS Selasa (1/10) pagi.

Verifikasi yang dilakukan pasca penilaian ini disebut untuk mengetahui kontinuitas dan komitmen sekolah dalam penerapan kebiasaan hidup sehat di sekolah. Ketua Tim Verifikasi LSS tingkat Nasional Abdul Rahman mengatakan kunjungannya itu merupakan tindak lanjut dari penilaian sekolah sehat yang terlaksana bulan Agustus lalu. SDN 3 Banjar Jawa yang mewakili Bali. SD ini merupakan satu dari sembilan SD yang diverifikasi kembali dari sembilan provinsi se Indonesia. "Verifikasi ini kami lakukan untuk melihat sekolah yang sebelumnya sudah dinilai dan mencocokkan data yang kami pegang dengan kondisi riil sekolah saat ini, apakah



VERIFIKASI LSS tingkat Nasional saat mengunjungi SDN 3 Banjar Jawa Buleleng, selaku duta Provinsi Bali dalam LSS tingkat nasional, Selasa (1/10).

sesuai atau belum," ujarnya.

Proses verifikasi ini juga disebutnya merupakan inovasi penilaian LSS tahun ini yang menambah kategori penilaian yakni karakter dasar. Proses verifikasi pun dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana komitmen sekolah dalam menjalankan pola hidup bersih disekolahnya yang dilihat dari karakter dasar siswa dan warga sekolah.

Wakil Bupati Buleleng dr I Nyoman Sutendra SpOG yang mendampingi tim verifikasi merasa bangga dikunjungi kembali oleh tim pusat. Dengan pengecekan kembali kondisi sekolah akan dapat meyakinkan tim pusat bahwa kondisi sekolah yang bersih, aman dan nyaman memang benar-benar diterapkan dan sudah menjadi kebiasaan di

SDN 3 Banjar Jawa

Menurutnya, SDN 3 Banjar Jawa sebagai perwakilan Bali memiliki misi penting dan point pemungkas yang menjadi andalan di dalam penilaian. Yaitu pemeliharaan lingkungan dan pendidikan budi pekertinya sehingga membuat seluruh warga sekolah sadar terhadap kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekolahnya. Salah satunya yakni menekan penggunaan plastik termasuk pengolahan sampah program pemerintah daerah. "Lomba Sekolah Sehat ini sangat sejalan dengan program Kabupaten Sehat yang memiliki tujuan yang sama menjaga lingkungan dari bahaya sampah plastik. Ke depannya bagaimana anak-anak ini bisa menggetok tuliskan kebiasaan mereka di sekolah ke lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya terkait dengan pola hidup sehat," ungkap Wakil Bupati Sutendra @ R2S



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Nusa Bali*

Kategori : *BPJS*

Klaim Biaya Kesehatan Menumpuk

BPJS Belum

Pastikan Membayar



● NUSABALI SUJITA
KEPALA BPJS Kesehatan Cabang Singaraja Elly Widiyani.

RSUD kembali mengajukan klaim periode Agustus 2019, sekitar Rp 6 miliar. Total klaim yang diajukan RSUD ke BPJS periode Juni-Agustus mencapai Rp 23 miliar.

SINGARAJA, NusaBali
Jumlah klaim biaya kesehatan yang diajukan pihak RSUD Buleleng, terus bertambah.

Namun, pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Singaraja, belum dapat memastikan pembayaran klaim tersebut.

Semula RSUD Buleleng mengajukan klaim biaya kesehatan periode Juni-Juli 2019 Rp 17 miliar. Jumlah tersebut belum bisa dilunasi oleh BPJS hingga September 2019. Kini, RSUD kembali mengajukan klaim periode Agustus 2019, sekitar Rp 6 miliar. Total klaim yang diajukan RSUD ke BPJS periode Juni-Agustus mencapai Rp 23 miliar.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Singaraja, Elly Widiyani yang dikonfirmasi Selasa (1/10), mengakui baru bisa membayarkan klaim dari pihak RSUD Buleleng sampai pelay-

anan Mei 2019. Sedangkan untuk klaim periode Juni-Juli yang sudah terverifikasi Rp 17 miliar, belum dapat dibayarkan. "Nah, kami juga belum tahu kapan bisa dibayarkan. Kami berharap segera diadakan penyesuaian besaran iuran, sehingga kondisi ini tidak terulang lagi," katanya.

Dijelaskan, kesulitan pembayaran klaim terjadi sebagai akibat dari tidak sesuainya pembiayaan dengan iuran yang dibayar oleh peserta BPJS. Karena iuran yang ada saat ini, masih jauh dari nilai iuran yang sesungguhnya. "Sejak awal memang kami sudah tahu akan terjadi kekurangan pembiayaan. Ini terjadi karena setting iuran yang belum sesuai dengan nilai iuran yang sesungguhnya. Makanya, kemarin itu

di Kementerian Keuangan akan menyesuaikan. Nah kami berharap ini bisa terwujud," terang Elly Widiyani.

Menurut Elly Widiyani, RSUD Buleleng bisa saja mengajukan skema *supply chain financial* (SCF) sebagai alternatif pembiayaan. Artinya, berita acara pengajuan klaim yang telah disetujui BPJS, dapat diajukan ke bank pemerintah sebagai jaminan pembayaran. "Proses (pembayaran klaim) di BPJS memang cukup panjang, sedangkan pelayanan di RSUD tidak boleh terputus. Kami sangat paham hal ini. Kami harap sistem (SCF) ini bisa digunakan. Sehingga cash flow tidak terkendala," tandas Elly.

Sebelumnya, RSUD Buleleng,

terpaksa pinjam dana ke BPD Bali guna menalangi biaya operasional. Hal ini karena klaim biaya kesehatan dari BPJS Kesehatan tidak kunjung cair. Langkah RSUD ini pun telah disetujui oleh Pemkab Buleleng dan Lembaga DPRD Buleleng, dalam bentuk pinjaman daerah jangka pendek.

Direktur Utama (Dirut) RSUD Buleleng dr I Gede Wiartana menjelaskan, klaim biaya kesehatan yang diajukan ke BPJS untuk Juni-Juli 2019, sekitar Rp 17 miliar belum cair. Sedangkan RSUD dituntut harus siap dengan biaya kesehatan terhadap pasien pengguna Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berobat ke RSUD. "Rat-rata tiap bulan itu tang-

gungan biaya kesehatan pasien peserta JKN yang harus kami siapkan itu Rp 7 miliar - Rp 8 miliar. Sedangkan klaim Juni-Juli belum dibayarkan. Kalau tidak lakukan pinjaman daerah, jelas kami kelimpungan," jelasnya.

Menurut Dirut Wiartana, pinjaman tersebut sebesar Rp 30 miliar, akan dipakai sesuai kebutuhan hingga akhir tahun 2019. Meski demikian, pinjaman tersebut memiliki jangka waktu setahun hingga tahun 2020. "Jaminan dari pinjaman itu kami pakai klaim biaya kesehatan ke BPJS. Artinya kalau klaim itu cair, langsung kami bayarkan ke bank. Sehingga system keuangan kami tetap seimbang," katanya. **k19**